

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perbedaan Atribusi, Delegasi dan Mandat Dalam UU No.30/2014	59
Tabel 3.1.	Kedudukan Perda Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	73
Tabel 3.2.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarkhi Pasca Amandemen UUD 1945	73
Tabel 3.3.	Perkada yang Dibentuk Atas Perintah Perda	98
Tabel 3.4.	Perkada yang Dibentuk Atas Perintah Perundang-Undangan Lebih Tinggi	100
Tabel 3.5.	Perkada yang Dibentuk Untuk Melaksanakan Ketentuan Lain Dalam Perda atau PPU yang Lebih Tinggi yang Tidak Memerintahkan Secara Tegas	101
Tabel 3.6.	Perbedaan Rumusan Pembentukan Peraturan Pelaksana Antara UU Nomor 10 Tahun 2004 dengan UU Nomor 12 Tahun 2011	108
Tabel 3.7.	Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Dalam Pembentukan Perkada Antara UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 23/2014	114
Tabel 4.1.	Jumlah Perda Provinsi Jambi dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019	121
Tabel 4.2.	umlah Pergub Delegasi Perda Provinsi Jambi dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019	123
Tabel 4.3.	Perda tentang Pencabutan Perda Provinsi Jambi dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019	125
Tabel 4.4.	Perbandingan Penggunaan Frasa Perintah Dalam Perda Kepada Perkada Dalam Perda Provinsi Jambi dan Jawa Timur Tahun 2018-2019	127

Tabel 4.5.	Variasi Keterangan Perintah Frase “Diatur” Dari Perda Kepada Perkada Dalam Perda Provinsi Jambi dan Jawa Timur Tahun 2018-2019	128
Tabel 4.6.	Pendelegasian Blangko Dalam Perda Provinsi Jambi dan Jawa Timur Tahun 2018-2019	135
Tabel 4.7.	Realisasi Jumlah Pergub yang Diperintahkan oleh Perda Provinsi Jambi Tahun 2018-2019	137
Tabel 4.8.	Realisasi Jumlah Pergub yang Diperintahkan oleh Perda Provinsi Jateng Tahun 2018-2019	141
Tabel 4.9.	Penyimpangan Materi Muatan Pergub dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi	160